



**LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
JAKARTA, JANUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2017 beserta realisasinya.

Selama tahun 2017, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2018
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan
Informatika,

Edwin JH Wuisang, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Anggaran

Sepanjang 2017, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 869.280.799 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau **99,82%** dari seluruh pagu anggaran 2017 sebesar Rp. 940.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 69.184.000 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 870.816.000 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)**. Sisa anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.535.201 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2017 berjumlah **354** dokumen (yang terdiri atas 310 rekomendasi kebijakan, 25 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 19 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 221,25% dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,82%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (221,25%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang, terutama mekanisme penyusunan target output.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika .	9
B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016	12
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016	19
BAB IV PENUTUP	22
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016	22
B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LKj mempunyai manfaat sebagai :

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal di atas, Keasistendeputian (Keasdepan) Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2017.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Fungsi Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:

- a. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan; dan
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbidang Pertahanan; dan
- b. Subbidang Keamanan.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan terdiri dari:

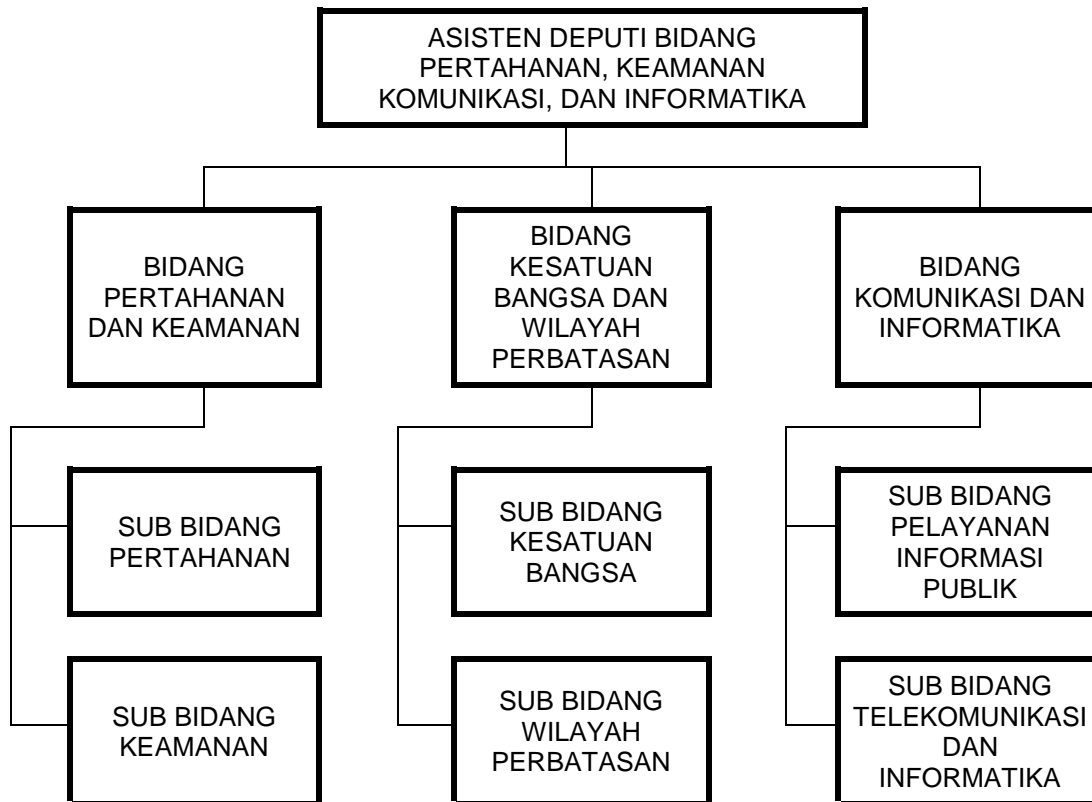
- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Wilayah Perbatasan.

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- b. Subbidang Telekomunikasi dan Informatika.

Bagan struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut.



Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada akhir 2017 adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputy	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	3	Kepala Bidang	3	2	1	-	-	3	2	1	3
III/d	4	Kepala Subbidang	5	3	1	-	-	4	2	2	4
III/b	1			1	-	-	-	1	1	-	1
III/a	3	Analisis	3	-	3	-	-	3	1	2	3

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
Jmlh	12		12	7	5	-	-	12	6	6	12

Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, masih belum ideal, karena ada subbidang yang tidak memiliki dukungan SDM yang memadai. Sehubungan dengan kekurangan SDM tersebut, sebagian kegiatan kinerja harus dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja sering dilakukan dengan kerja lembur para staf.

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan Organisasi

- 1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi
- 2) kebijakan organisasi
- 3) sumber daya manusia yang berkualitas

b. Kelemahan Organisasi

- 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal
- 2) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh.

c. Potensi Organisasi

- 1) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi,
- 2) tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan
- 3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

- 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

c. Aspek Prasarana dan Sarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat Kabinet, sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi ini ditindaklanjuti oleh Kedeputian Polhukam dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Asdep 4) sesuai dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

VISI

Sekretariat Kabinet	Kedeputian Polhukam	Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan	Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan andal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.	Menjadi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika

MISI

Sekretariat Kabinet	Kedeputian Polhukam	Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan	Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet	Memberikan dukungan kepada Kedeputian Bidang Polhukam dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan

memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika dan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
--	---	--

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan :

1. Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas
3. Terwujudnya layanan informasi yang responsif dan transparan.

Dari ketiga tujuan di atas, tujuan yang relevan dengan lingkup Asdep 4 adalah tujuan nomor 1. Menindaklanjuti tujuan nomor 1, maka tujuan Asdep 4 dapat dirumuskan menjadi: “Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika.”

Guna mencapai tujuan, perlu dirumuskan sasaran-sasaran strategis organisasi. Dari 3 tujuan Sekretariat Kabinet di atas, sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah :

1. Peningkatan kualitas hasil rekomendasi analisis kebijakan
2. Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
3. Peningkatan layanan informasi yang responsif dan transparan.

Dari ketiga sasaran strategis di atas, sasaran strategis yang relevan dengan lingkup Asdep 4 adalah sasaran strategis nomor 1. Menindaklanjuti sasaran strategis nomor 1, maka sasaran strategi Asdep 4 dapat dirumuskan menjadi: “Peningkatan kualitas hasil rekomendasi analisis kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika.”

Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan) dan *Time-bound* (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam

rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asdep 4 menetapkan program operasional yaitu: *“penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika kepada Kedeputian Bidang Polhukam”*.

B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2016

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka “Penetapan Kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika” adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2017

Secara garis besar, keenam indikator kinerja utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. dokumen (berupa laporan dan rekomendasi) yang disusun secara tepat waktu, dan
2. dokumen yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan dua kelompok tersebut, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi dan Capaian Tahunan				
	Tahunan (%)	Tahunan (Kuantitas)	Output Tahunan (Kuantitas)	Outcome Tahunan (Kuantitas)	Outcome dibanding Output (%) [(5):(4)]	Outcome dibanding Target (%) [(6):(2)]	Outcome dibanding Target (Kuantitas) [(5):(3)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dokumen yang disusun tepat waktu	100%	160	354	354	100%	100%	221.25%
Dokumen yang ditindaklanjuti	100%	160	354	354	100%	100%	221.25%

Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Asdep kepada Deputi dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 5 hari kerja), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/disampaikan oleh Asdep diterima, disetujui, atau mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan.

Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang 2017 oleh unit kerja ini berjumlah 354 dokumen (terdiri dari 310 rekomendasi kebijakan, 25 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 19 rekomendasi materi sidang kabinet), atau 221,25% lebih dari jumlah seluruh output yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2017, yaitu 160 dokumen.

Sepanjang 2017, unit kerja ini menerima surat sebanyak 1616 (Seribu enam ratus enam belas) surat. Setelah surat-surat tersebut ditelaah dan diseleksi, tindak lanjut dari surat sebanyak itu adalah 354 memorandum (baik berupa rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang kabinet) dari Asisten Deputi kepada Deputi. Dari 354 memorandum tersebut 138 memorandum diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet. Dari 138 memorandum yang diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet, 60 memorandum ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan diteruskan kepada Presiden.

Materi yang disampaikan dalam memo-memo Periode **1 Januari - 31 Desember 2017** oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut meliputi antara lain:

Memo Rekomendasi Kebijakan:

- a. Laporan rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017;
- b. Laporan rapat terkait review atas pelaksanaan instruksi presiden nomer 6 tahun 2015 dan penyiapan konsep pengembangan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan;
- c. Laporan rapat pembahasan rencana detail tata ruang (rdtr) di kawasan perbatasan negara
- d. Laporan rapat penyusunan rancangan keputusan presiden tentang organisasi perundingan batas wilayah negara;
- e. Surat Seskab nomor: B-628/Seskab/Polhukam/11/2016 tanggal 2 November 2016 kepada Menteri PUPR hal Perkembangan Pelaksanaan Perpres Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarannya di

Desa Tawiri Ambon;

- f. Penyelenggaraan Rakor di Setkab membahas perkembangan pelaksanaan pembangunan Dermaga Tawiri pada tanggal 19 Januari 2017 dan 6 Februari 2017 dengan mengundang Kementerian PUPR, Kemkeu, Kementerian ATR/BPN, BPKP, dan TNI AL;
- g. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon melalui peninjauan lapangan pada tanggal 28 September 2017; dan
- h. Penyelenggaraan Rakor di Setkab membahas Laporan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon pada tanggal 8 Desember 2017.

Memo Rekomendasi Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU:

- a. Rekomendasi pertimbangan pemberian izin prakarsa RPerpres tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Rekomendasi pertimbangan urgensi revisi Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penguatan Komunikasi Publik;
- c. Rekomendasi pertimbangan optimalisasi peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d. Rekomendasi pertimbangan pembentukan Komisi Perlindungan Data Pribadi dalam RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
- e. Rekomendasi pertimbangan bentuk sanksi, antara kejahatan pidana dengan pelanggaran pidana dalam RUU Perlindungan Data Pribadi;
- f. Penyusunan RKeppres Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan;
- g.

Memo rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan:

- a. Penyampaian rekomendasi materi rapat terbatas membahas lelang frekuensi bagi operator seluler;
- b. Penyampaian rekomendasi materi Rakornas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2017;
- c. Penyampaian rekomendasi materi pertemuan Presiden dalam IDBYTE 2017;
- d. Penyampaian rekomendasi materi pertemuan Presiden dalam *World Press Freedom* 2017;
- e. Penyampaian rekomendasi materi pertemuan Presiden dengan CEO perusahaan teknologi Plug and Play;
- f. Penyiapan Bahan Ratas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan Nasional tanggal 12 Januari 2017;
- g. Penyiapan Bahan Ratas tentang Pemantapan Bela Negara tanggal 26 Juli 2017; dan
- h. Penyiapan Bahan Ratas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) tanggal 26 Juli 2017.

Perbandingan jumlah dokumen yang diterima dan dilaporkan kepada pimpinan dari tahun ke tahun sejak 2013 ketika masih menggunakan nomenklatur Asdep Pertahanan, Keamanan, Pertanahan dan berganti menjadi Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah surat substansi yang diterima Asdep Pertahanan, Keamanan, <u>Pertanahan/Komunikasi & Informatika</u>	356	316	1100	1173	1616
Jumlah surat substansi yang diproses dan dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum laporan	200	214	323	373	354

Tidak semua surat yang diterima oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika diproses dan dilaporkan kepada pimpinan, karena surat-surat tersebut perlu ditelaah lebih dulu dan kemudian diseleksi untuk

menentukan surat-surat mana yang perlu diproses dan dilaporkan atau ditindaklanjuti, dan mana yang tidak.

Kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang panjang dalam mendapatkan bahan terkait penyusunan rekomendasi dengan *stakeholder* terkait;
2. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah;
3. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan kunjungan;
4. Kejadian tidak terduga (seperti: kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa ditemui;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai;
7. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada saat pelaksanaan tugas;
8. Kurangnya forum peningkatan kapasitas diri Pejabat/Pegawai yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet; dan
9. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi utama.

Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan gangguan signifikan terhadap kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asdep

Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan dalam keberhasilan Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memenuhi IKU antara lain adalah: jumlah pegawai yang sedikit (hanya 13 orang, dari Asdep hingga staf) sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi, kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang mendukung, dan kemampuan untuk dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Rencana Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2017 terutama adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan di daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah terkait revitalisasi TVRI dan RRI, penguatan komunikasi public pemerintah dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu beserta Sarana dan Prasarana Penunjangnya.

Selain melakukan pemantauan dan pengamatan ke beberapa daerah di Indonesia, beberapa pegawai unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga memperoleh kesempatan untuk menghadiri kegiatan pemerintahan di luar negeri, yaitu:

1. Pertemuan ke-7 *Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC ke-7)*

Konferensi ini dilaksanakan di Wina, Austria, pada tanggal 5 s.d.11 November 2017. *Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC ke-7)* merupakan agenda dua tahunan bertujuan untuk mendukung Negara Anggota untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan konvensi, memperkuat kerjasama antarnegara dalam mencapai tujuan konvensi, serta mempromosikan dan mengevaluasi proses implementasi konvensi di masing-masing negara.

2. Pertemuan Tahunan *United Nations Forum on Business and Human Rights*

Pertemuan ini bertempat di Jenewa, Swiss, pada tanggal 25 s.d. 30 November 2017. Pertemuan Tahunan Bisnis dan HAM tahun 2017 mengangkat tema “Realizing Access to Effective Remedy”, dihadiri lebih dari 2000 partisipan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, komunitas, masyarakat sipil, organisasi dagang, institusi nasional ham, akademisi, dan media. Pertemuan bertujuan untuk memperkuat jejaring, berbagi pengalaman, dan inisiasi dalam rangka mempromosikan bisnis dan HAM.

3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-31

KTT ASEAN ke-31 dilangsungkan di Manila, Filipina pada tanggal 10-14 November 2017. KTT ini dihadiri oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN dan juga Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Amerika Serikat, Kanada, RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan juga Sekretaris Jenderal PBB. KTT ini menghasilkan ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Konsensus ini mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh pekerja migran seperti hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakuan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam serikat pekerja di Negara penerima, dan hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja.

4. G-20 *Multi-Stakeholder Conference Digitalisation Policies for a Digital Future*

Acara ini diselenggarakan di Dusseldorf, Jerman, pada tanggal 4 - 9 April 2017. Delegasi Indonesia terdiri dari (Kementerian Kominfo, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Sekretariat Kabinet) telah berupaya memasukkan kearifan pola digitalisasi di Indonesia dalam tiga bidang utama, yakni ekonomi berbagi (*shared economy*), digitalisasi angkatan kerja (*workforce digitalisation*), dan keuangan inklusif (*financial inclusion*) dengan tujuan agar mampu memberikan ekosistem yang sesuai dalam proses digitalisasi. Delegasi Indonesia menyerukan agar G20 memfokuskan pada inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan melalui adaptasi

dan implementasi yang cepat atas model bisnis dan kerangka kerja digital ekonomi sebagai enabler untuk ekonomi berbagi, digitalisasi angkatan kerja, dan inklusi finansial. Dalam naskah preposisi yang disampaikan dalam forum, Indonesia juga menyampaikan keberhasilan menyelenggarakan program-program inkubasi dan pengembangan beragam model bisnis ekonomi digital yang terbukti praktis, efektif, dan scalable untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemberdayaan UMKM.

5. Sesi ke-39 Sidang Umum UNESCO (*The 39th Session of the UNESCO General Conference*)

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-14 November 2017 yang bertempat di Kantor Pusat UNESCO di Paris. Pertemuan tahun ini membahas implementasi Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030, yang antara lain *gender quality, innovation and infrastructure* dan *innovation and infrastructure*. Salah satu hasil penting yang dicapai oleh delegasi Indonesia pada pertemuan ini adalah terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota *Executive Board* UNESCO periode tahun 2017-2021 bersama India, Jepang, RRT, dan Filipina.

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017, Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 940.000.000 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp.69.184.000 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dalam rangka realisasi anggaran dimaksud, telah ditetapkan kegiatan (yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika”, dengan kode 06.5018), dengan output yang terdiri dari 3 (tiga) keluaran/komponen yaitu: “penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (216), “penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan

substansi rancangan PUU di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (217), dan “penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika” kode (218) dari Januari hingga Desember 2017. Perincian pembagian tersebut, pemanfaatan anggaran, dan jumlah output yang dihasilkan per komponen dan sub komponen adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel Pemanfaatan Anggaran oleh Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2017

Kode	Kegiatan/Komponen	TARGET		REALISASI		% Realisasi		Keterangan Pemanfaatan
		Output (dokumen)	Anggaran (Rp)	Output (dokumen)	Anggaran (Rp)	Output	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
216	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	160 reko- mendasi	877.308.000 Direvisi 838.967.000	310 reko- mendasi	837.432.199	221,25%	99,81%	- Melaksanakan arahan Presiden terkait PLBN - Melaksanakan arahan Presiden terkait revitalisasi TVRI dan RRI
217	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika		46.892.000 Direvisi 31.949.000	25 reko- mendasi	31.848.600		99,99%	Melakukan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika
218	penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika		15.800.000 Direvisi 0	19 reko- mendasi	0		0	Revisi anggaran sebesar Rp. 15.800.000.
TOTAL								
5018	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	160	870.816.000	354	869.280.799	240%	99,82%	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi Anggaran

Sepanjang 2017, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 869.280.799 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau **99,82%** dari seluruh pagu anggaran 2017 sebesar Rp. 940.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp.69.184.000 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 870.816.000** (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Sisa anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.535.201 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2017 berjumlah **354** dokumen (yang terdiri atas 310 rekomendasi kebijakan, 25 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 19 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 221,25% dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,82%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (221,25%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja

diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang 2017, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti :

1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya;
2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. memaksimalkan efektivitas prasarana dan sarana yang tersedia;
4. membuat sistem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi, penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui;
5. memutakhirkan (meng-*update*) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;
6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, seperti: membuat electronic media group dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk memfasilitasi koordinasi para pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, Komunikasi, dan Informatika secara online, dan menciptakan *database* isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;

7. mengikutsertakan staf dalam tim-tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti: Tim Anggaran, Tim SAKIP, dan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet; dan
8. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
